

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Ketahanan pangan merupakan salah satu isu strategis yang menjadi perhatian utama di berbagai wilayah Indonesia, terutama di wilayah pedesaan yang rentan terhadap tantangan perubahan iklim dan keterbatasan sumber daya. Ketahanan pangan sangat penting dan memainkan peran penting dalam mata pencaharian penduduk pedesaan, karena makanan merupakan komponen penting yang dicerna secara teratur dalam jumlah tertentu, berasal dari sumber daya hayati serta sektor-sektor seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, akuakultur, peternakan, dan sumber daya laut, yang mencakup bentuk olahan dan tidak diproses yang dimaksudkan untuk digunakan sebagai bahan dalam makanan dan minuman. (Ginting *et al.*, 2023). Dalam konteks ini pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan sumber alokasi dana yang akurat menjadi langkah penting untuk mendukung ketahanan pangan yang berkelanjutan. Upaya pemerintah dalam mempertahankan ketahanan pangan nasional berkesinambungan didukung dengan adanya program baru yang diluncurkan, dimana petani tidak lagi didominasi dengan hanya orang tua saja yang menggeluti profesi sebagai petani, pemerintah Indonesia menyadari perlunya melibatkan generasi muda khususnya yang dikenal dengan petani milenial dengan pendapatan yang menjanjikan tinggi.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah petani milenial di Indonesia mencapai sekitar 6,18 juta orang, yang merupakan 21,93% dari total 28,19 juta petani. Petani milenial didefinisikan sebagai individu berusia antara 19

hingga 39 tahun yang memiliki keterampilan teknologi digital dan siap berinovasi dalam praktik pertanian.

Kementerian Pertanian berkomitmen untuk mendukung petani milenial dengan berbagai program, termasuk optimalisasi lahan dan penyediaan alat pertanian modern. Dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang pelatihan kelembagaan petani, ditetapkan bahwa kemajuan kelompok tani (poktan) bertujuan untuk (a) memperkuat poktan menjadi Lembaga Pertanian yang kuat dan otonom; (b) meningkatkan kompetensi anggota dalam bidang pengembangan agribisnis; dan (c) menambah kapasitas poktan untuk melaksanakannya fungsi yang ditunjuk. (Khoiriyah *et al.*, 2022). Dalam hal ini, menteri pertanian Amran Sulaiman menyatakan bahwa dana sebesar Rp10 triliun hingga Rp15 triliun akan dialokasikan untuk penyediaan alat, benih, dan pupuk. Selain itu, infrastruktur pendukung seperti jaringan irigasi juga akan diperbaiki untuk memastikan pasokan air yang efisien. Implementasi program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi juga menciptakan peluang bagi generasi muda untuk terjun ke sektor ini. Setiap tim yang terdiri dari 15 petani milenial akan diberikan modal sebesar Rp 3 miliar untuk mengelola lahan pertanian seluas 200 hektar. Dengan insentif yang dijanjikan pemerintah berharap kontribusi petani muda terhadap total petani nasional dapat mencapai 10% dalam waktu dekat.

Sebuah desa, sebagaimana digambarkan dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014, merupakan badan hukum dalam masyarakat yang mengelola dan mengawasi urusan pemerintahan, sementara juga menangani kepentingan

masyarakat, berdasarkan prinsip hak-hak adat dan hak-hak tradisional penduduk, sebagaimana diakui oleh pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengingat statusnya sebagai bentuk pemerintahan lokal yang terkait erat dengan warga dalam suatu bangsa, desa mengambil peran penting dalam konteks masalah nasional. Pemerintah desa merupakan salah satu komponen paling mendasar dari struktur tata kelola nasional, dengan wewenang untuk mengelola dan melindungi kepentingan masyarakat (Djoko Purwanto, *et al.*, 2019).

Kewajiban administrasi desa meliputi masalah desa domestik, fungsi tata kelola, inisiatif pembangunan, dan peningkatan masyarakat, selain memberikan dukungan kepada masyarakat, khususnya dalam bidang penguatan ekonomi masyarakat dan mendorong pembangunan daerah. Kemajuan sarana dan prasarana desa, pemberdayaan masyarakat, pembangunan sumber daya alam yang berkelanjutan (SDA), dan budidaya sumber daya manusia (SDM), di samping penciptaan peluang kerja, penciptaan prospek bisnis, peningkatan pendapatan masyarakat dan kelangsungan hidup ekonomi, serta pembentukan struktur masyarakat yang kuat semuanya menjadi fokus utama (Susanto & Iqbal, 2019).

Pembangunan pedesaan didukung oleh prinsip-prinsip penting masyarakat yang ditandai dengan transparansi, keterlibatan *partisipatif*, *aksesibilitas* bagi warga negara, mekanisme *akuntabilitas*, dan keberlanjutan. Pelaksanaan pembangunan pedesaan didekati melalui strategi yang *multisektoral* dan *partisipatif* yang diinformasikan oleh cita-cita otonomi, orientasi regional, dan keberlanjutan jangka panjang, di samping implementasi harmonis pengembangan sumber daya energi untuk mencapai hasil yang optimal.

Dalam pelaksanaan inisiatif pembangunan pedesaan, kerja sama antar daerah memerlukan pemeriksaan menyeluruh. Sangat penting untuk mempertimbangkan kompatibilitas antar daerah, karena distribusi kegiatan industri, upaya pertanian, dan sektor sosial yang mendukung sering terkonsentrasi dalam batas-batas administratif masyarakat tetangga. Akibatnya, beberapa wilayah dapat berkembang secara bersamaan dan memberikan dukungan timbal balik. Melalui kolaborasi antar daerah, menjadi layak untuk mencapai pembangunan yang seimbang di kedua zona pertanian dan sektor lainnya, sehingga meningkatkan nilai tambah dan memfasilitasi persiapan tenaga kerja.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya sistematis yang bertujuan untuk menumbuhkan lingkungan yang merangsang, mendorong, dan mengaktualisasikan potensi laten masyarakat, dicontohkan dengan peningkatan akses ke sumber daya ekonomi seperti modal keuangan, teknologi informasi, peluang kerja, dan aksesibilitas pasar, di samping kemajuan pendidikan dan kesehatan. Pemberdayaan individu dalam bidang ekonomi meliputi berbagai kolektif, termasuk produsen pertanian, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pasar lokal, BUMDES, dan konstituen lain yang mendukung infrastruktur ekonomi masyarakat. Tantangan akuisisi modal tetap menjadi masalah signifikan yang harus ditangani oleh penduduk pedesaan, termasuk petani, buruh, dan pengusaha kecil hingga menengah (Tanjung, 2021). Sudah diakui secara luas bahwa tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan prospek pekerjaan bagi masyarakat.

Berdasarkan penyelidikan ilmiah yang masih ada yang meneliti fenomena pemberdayaan masyarakat, wacana ini mencakup semua aspek tata kelola desa, dimulai dengan alokasi sumber daya keuangan desa, diikuti dengan perencanaan strategis dan pelaksanaan inisiatif pembangunan daerah. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, stabilitas tata kelola daerah sangat penting untuk kelangsungan hidup masyarakat di tengah keadaan ekonomi yang berlaku. Akibatnya, kolektif desa memungkinkan untuk menumbuhkan lingkungan yang kondusif untuk pelaksanaan kemampuan, otonomi, dan potensi intrinsik mereka.

Selanjutnya, pemberdayaan masyarakat berfungsi untuk memberikan langkah-langkah perlindungan bagi konstituennya. Dalam pelaksanaan inisiatif pemberdayaan masyarakat, keterlibatan anggota masyarakat sangat penting. Keterlibatan anggota dalam pengembangan masyarakat lokal meliputi kegiatan seperti perencanaan dan pelaksanaan inisiatif pengembangan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan mewakili ketersediaan dan kesiapan masyarakat untuk berkontribusi terhadap realisasi program pengembangan masyarakat yang dilaksanakan dengan biaya tertentu. Mengingat bahwa sumber daya yang dialokasikan untuk anggaran masyarakat terbatas dan jumlah program yang dilaksanakan cukup besar, ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Melalui keterlibatan aktif masyarakat, proses perencanaan pembangunan memperoleh karakter yang lebih disengaja, menandakan bahwa inisiatif pembangunan akan disesuaikan agar selaras dengan kebutuhan spesifik masyarakat, dan prioritas inisiatif ini akan terjadi sesuai dengan signifikansinya,

memastikan bahwa program pengembangan masyarakat dilaksanakan dengan kemanjuran dan efisiensi. Pemberdayaan masyarakat untuk memperkuat ketahanan pangan adalah upaya yang berfokus pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, akses, dan sumber daya yang memungkinkan masyarakat mengelola, memproduksi, serta memperoleh pangan secara mandiri dan berkelanjutan (Nelsi *et al.*, 2024). Keterlibatan masyarakat pada kegiatan pembangunan merupakan perwujudan dan keinginan masyarakat untuk berkontribusi terhadap prakarsa pembangunan. Tujuan yang terkait dengan perumusan dan pelaksanaan inisiatif pengembangan masyarakat adalah untuk meningkatkan produktivitas individu dan pendapatan keuangan, memperluas prospek pekerjaan, memulai usaha lokal baru, menambah volume dan kualitas penawaran pendidikan, dan mendorong otonomi yang lebih besar di antara individu.

Dalam inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan sosial ekonomi masyarakat yang ada di Desa Cipang Kiri Hilir, pemerintah kabupaten mengalokasikan sumber daya keuangan dari anggaran nasional ke desa untuk memfasilitasi kegiatan pembangunan utamanya di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan. Desa Cipang Kiri Hilir merupakan salah satu daerah yang mendapat manfaat dari APBN melalui Anggaran Kotamada/Kabupaten, yang biasa disebut sebagai dana desa. Dana desa mewakili sumber daya keuangan yang dialokasikan kepada masyarakat untuk mendukung pembangunan berkelanjutan mereka, yang mencakup pembangunan kapasitas dan inisiatif pemberdayaan masyarakat. Alokasi dana desa terutama diarahkan untuk membiayai pelaksanaan

beragam program dan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat setempat. Inisiatif ini mengikuti ketentuan yang diuraikan dalam Pasal 4 (Perdes, keterlambatan pembangunan daerah, dan transmigrasi nomor 21 tahun 2015) mengenai prioritas proyek desa. Tujuan menyeluruh dari pemanfaatan dana desa adalah untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk pedesaan, terutama dalam dimensi ekonomi, sosial, budaya, dan politik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemerintah desa CIPANG KIRI HILIR diketahui anggaran alokasi dana untuk kelompok tani sebagai berikut:

Tabel 1. 1 rincian alokasi dana kelompok tani desa CIPANG KIRI HILIR tahun 2024 s/d 2025

Kegiatan	Jumlah anggaran	Keterangan
Total dana alokasi	175.879.000	Dana keseluruhan alokasi untuk mendukung ketahanan pangan desa cipang kiri hilir
Dana kelompok tani peternakan sapi	144.150.000	Pembelian hewan ternak sapi
Bantuan bibit sayuran	31.729.000	Bibit kacang-kacangan dan terong

Sumber: olah data 2025

Berdasarkan tabel 1.1 rincian alokasi dana kelompok tani desa CIPANG KIRI HILIR di ketahui total keseluruhan alokasi dana sebesar rp.175.879.000. Untuk pembelian hewan ternak budidaya sebesar rp.144.150.000 dan bantuan bibit tanaman sayuran (kacang-kacangan dan terong) sebesar rp.31.729.000

Inisiatif pemberdayaan yang ditujukan untuk kelompok tani merupakan salah satu skema pemberdayaan masyarakat yang sangat penting di desa Cipang Kiri Hilir dan diakui sebagai fokus utama untuk alokasi sumber daya keuangan

desa. Inisiatif yang dicakup oleh program ini meliputi bantuan modal untuk kolektif pertanian, penyediaan benih tanaman, akuisisi peralatan pertanian, pengadaan pembudidaya, pelaksanaan program penyuluhan perkebunan, serta integrasi praktik peternakan dan pertanian. desa Cipang Kiri Hilir memiliki program kelompok tani yang berjalan dalam bentuk budidaya hewan ternak sapi dengan nama “Kelompok Tani Harapan Kita”.

Tabel 1. 2
Nama Kelompok Ternak Sapi Harapan Kita Desa CIPANG KIRI HILIR

Nama kelompok	Nama desa/dusun	Jumlah anggota	Jumlah hewan ternak
Harapan kita	Dusun 1 tandikat, desa cipang kiri hilir	3 (tiga) orang	3 ekor hewan ternak
	Dusun 2 lubuk ingu, desa cipang kiri hilir	3 (tiga) orang	3 ekor hewan ternak
	Dusun 3 simpang, desa cipang kiri hilir	3 (tiga) orang	3 ekor hewan ternak
Jumah	3 dusun	9 anggota	9 hewan ternak

Sumber: olah data 2025

Program ini telah berjalan sejak tahun 2024-2025 dan terbagi dari 3 dusun yaitu dusun 1 tandikat, dusun 2 lubuk ingu dan dusun 3 simpang. Setiap dusun memiliki 3 orang anggota, masing-masing dusun di berikan bantuan 3 ekor hewan ternak sapi untuk di budidayakan dan dikembangkan untuk menunjang ketahanan pangan yang mempuni di desa Cipang Kiri Hilir. Inisiatif ini dirancang oleh

pemerintah kota dengan tujuan meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat kurang mampu; Namun, inisiatif yang dimaksudkan tidak dilaksanakan secara optimal meskipun didukung sumber daya keuangan desa.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti mengangkat judul penelitian **“OPTIMALISASI PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN MELALUI PROGRAM KELOMPOK TANI DESA CIPANG KIRI HILIR”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks masalah yang telah dikemukakan, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

Bagaimana optimalisasi dalam pemberdayaan masyarakat melalui kelompok tani?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan konteks masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui optimalisasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat melalui kelompok tani.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Akademik

Penelitian ini dapat menambah referensi ilmiah mengenai pengelolaan dana desa, khusus nya dalam kaitan ketahanan pangan dan program kelompok tani. Memberikan sumbangan pemikiran konsep baru terkait optimalisasi peran pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa serta dapat dijadikan dasar

penelitian lebih lanjut mengenai kebijakan pembangunan pedesaan, pengelolaan keuangan desa, dan pemberdayaan kelompok tani.

1.4.2. Manfaat praktis

1. Untuk administrasi kota, sebagai data dan kontribusi kepada otoritas kota untuk memfasilitasi pengembangan dan pelaksanaan inisiatif masyarakat yang menguntungkan bagi lanskap ekonomi regional.
2. Bagi masyarakat, ini meningkatkan repositori pengetahuan dan informasi, sehingga memfasilitasi evaluasi dan persepsi mengenai inisiatif pemerintah yang ditujukan untuk peningkatan ekonomi.
3. Bagi penulis, selanjutnya, pemahaman dan kerangka kerja masyarakat dibudidayakan

1.5. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam proposal penelitian ini terdiri dari tiga bab yaitu sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Teks tersebut mencakup kerangka kontekstual dari masalah yang dihadapi, artikulasi masalah penelitian, penggambaran tujuan penelitian, keuntungan yang diantisipasi dari penelitian, kendala yang berkaitan dengan masalah, elemen orisinalitas, dan organisasi sistematis wacana tertulis.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini membahas landasan teoritis yang digunakan sebagai dasar untuk penyelidikan yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menggambarkan berbagai objek penelitian, klasifikasi penelitian, kelompok demografis dan metodologi pengambilan sampel, jenis dan asal data, teknik untuk akuisisi data dan metodologi untuk analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menggambarkan temuan penyelidikan dan mengartikulasikan wacana seputar implikasi dari temuan ini.

BAB V : PENUTUP

Bab ini mencakup temuan dan rekomendasi yang berasal dari penelitian yang dilakukan.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Desa

Istilah “Desa” berasal dari kata linguistik India “Swadesi,” berarti tempat asal, tempat tinggal, kebangsaan, atau wilayah leluhur, dan menunjukkan entitas kohesif yang dicirikan oleh seperangkat norma bersama dan batas komunitas yang digambarkan. Desa dikonseptualisasikan sebagai manifestasi interaksi antara kolektif individu dan lingkungan sekitarnya. Agregasi ini menghasilkan bentuk atau representasi tertentu di permukaan terestrial, yang dihasilkan dari interaksi berbagai komponen fisiografi, sosial ekonomi, politik, dan budaya dalam masyarakat di berbagai wilayah. Desa adalah sebuah komunitas masyarakat hukum dengan batas wilayah tertentu yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola kepentingan warganya. Kewenangan ini didasarkan pada asal usul dan adat istiadat lokal yang diakui serta dihormati dalam kerangka Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 (Zulfan, *et al.*, 2019).

Menurut undang-undang no. 6 tahun 2014, desa merupakan badan hukum yang digambarkan oleh batas-batas geografis penduduk, yang mengatur dan mengelola urusannya, dengan kepentingan yang berasal dari inisiatif, hak-hak adat, dan hak-hak tradisional masyarakat yang diakui di bawah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebuah desa dicirikan sebagai kolektif individu yang mendiami daerah tertentu, berfungsi sebagai organisasi tata kelola

masyarakat yang menetapkan kerangka peraturan sendiri, dan dipimpin oleh kepala desa terpilih. Ini menyiratkan bahwa desa berfungsi sebagai unit kelembagaan tata kelola masyarakat yang diberkahi dengan wewenang untuk mengawasi yurisdiksinya, meliputi upaya pertanian, pengelolaan sumber daya alam, serta tanggung jawab regional, termasuk tempat tinggal pedesaan, layanan pemerintah, kesejahteraan sosial, dan usaha ekonomi.

Permukiman pedesaan di Indonesia sebagian besar dikategorikan ke dalam desa pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Menurut instruksi menteri dalam negeri Indonesia nomor 11 tahun 1972 tentang kerangka klasifikasi dan tipologi, desa-desa ini digambarkan lebih lanjut menjadi tiga (Nelsi *et al.*, 2024):

1. Desa swasembada, didefinisikan sebagai komunitas terbelakang di mana praktik budaya tradisional penduduk masih dominan, melakukan kegiatan mereka sesuai dengan adat istiadat yang sudah mapan. Tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan di desa-desa tersebut biasanya rendah.
2. Desa swadaya mengacu pada komunitas yang berkembang melampaui batas-batas swasembada tradisional, dengan penduduknya semakin mentransisikan sarana mata pencaharian mereka dari sektor primer ke berbagai sektor lainnya.
3. Desa-desa mandiri menunjukkan otonomi di semua dimensi, mencakup bidang sosial dan ekonomi, karena penduduk masyarakat, terutama yang terlibat dalam pertanian, telah mulai menyimpang dari ketergantungan pada adat istiadat tradisional atau pola yang mapan.

2.1.2. Optimalisasi Dana Desa

Menurut kamus bahasa Indonesia, istilah “Optimasi” berasal dari kata “optimal,” yang menunjukkan keadaan tertinggi atau terbaik. Optimasi diartikulasikan sebagai standar dimana beragam kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi melalui pelaksanaan berbagai kegiatan komunal. Mengingat definisi ini, optimasi menandakan hasil yang dicapai dengan cara yang efektif dan efisien, dengan tujuan menyeluruh untuk menambah manfaat sosial yang diperoleh dari upaya kolektif masyarakat. Selain itu, optimasi dapat diartikan sebagai upaya bersama untuk menyelesaikan tugas-tugas dengan hasil yang patut dicontoh dan peningkatan pendapatan masyarakat tanpa mengorbankan kualitas atau kuantitas output. Secara alami, pemanfaatan sumber daya desa yang paling menguntungkan diantisipasi untuk memfasilitasi eksploitasi potensi masyarakat secara optimal, baik yang mencakup sumber daya alam maupun kemampuan manusia.

Menurut ringkasan dana desa yang disebarluaskan oleh Menteri Keuangan Masyarakat pada tahun 2017, dana desa merupakan alokasi fiskal yang berasal dari APBN masyarakat yang khusus ditujukan untuk desa, bertujuan memfasilitasi dan meningkatkan inisiatif masyarakat melalui dukungan keuangan Anggaran Kota/Kabupaten (Kemenkeu, 2017). Dana desa, sebagaimana digambarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014, merupakan sumber fiskal yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) dialokasikan untuk desa, yang kemudian dialihkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan digunakan untuk menanggung struktur tata kelola, mengelola inisiatif pembangunan, mendorong pertumbuhan masyarakat, dan mendorong

pemberdayaan (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 2014). Dana desa memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memastikan penyediaan layanan penting, meningkatkan kapasitas dan kompetensi masyarakat, memajukan pembangunan ekonomi desa, mengurangi konflik antar desa, dan memfasilitasi pembangunan yang adil di seluruh masyarakat secara bersamaan. Distribusi sumber daya keuangan ke desa-desa merupakan penerapan praktis dari arahan yang ditetapkan dalam Perintah No. 6 tahun 2014. Tujuan dari mengalokasikan dana desa ini adalah untuk mendorong anggota masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan produktif (Zulfan, *et al.*, 2019).

Berdasarkan Peraturan yang diberlakukan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK/2020 tentang pengelolaan dana desa, Pasal 38 menggambarkan:

1. Alokasi dana desa terutama diarahkan pada fasilitasi revitalisasi ekonomi dan kemajuan sektor-sektor prioritas.
2. Revitalisasi ekonomi, sebagaimana diartikulasikan dalam ayat (1), mencakup inisiatif seperti jaring pengaman sosial, proyek padat karya, pemberdayaan usaha untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pengembangan pertanian, dan peningkatan kompetensi desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
3. Kemajuan sektor prioritas, sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1), diwujudkan melalui inisiatif yang bertujuan untuk membangun desa digital, mengembangkan tujuan wisata, mempromosikan praktik pertanian, meningkatkan pengelolaan peternakan, memperkuat sektor perikanan,

memastikan keamanan pangan dan hewan, dan meningkatkan infrastruktur kesehatan.

4. BLT desa seperti masyarakat diartikan pada ayat (2) menjadi sektor prioritas pertama dalam pemanfaatan dana desa dalam situasi saat ini.
5. Prioritas alokasi sumber daya keuangan desa, khususnya bagi masyarakat, digambarkan dalam ayat (1) sebagai inisiatif yang bertujuan untuk mengurangi dampak buruk dari pandemi COVID-19.
6. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menegaskan bahwa prioritas pengeluaran dana desa harus selaras dengan ketentuan yang ditetapkan dalam ayat (1).

Program dana desa dan kegiatan program lokal dirancang secara strategis untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk pedesaan, selain melayani juga bertujuan mengurangi kemiskinan. Setiap tahun, dana desa mengalokasikan sumber dayanya untuk memprioritaskan penerima manfaat bagi program pemberdayaan masyarakat, tergantung pada kondisi spesifik dan kemampuan yang melekat di desa, termasuk tujuan yang digambarkan dalam RPJMDes dan RKPDDes.

- a. Dana desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pokok yaitu:
 - 1) Pembangunan posyandu dan Polindes
 - 2) Pembinaan dan pengelolaan Posyandu
 - 3) Pembinaan serta pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD)
- b. Penggunaan dana desa diutamakan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa, masyarakat meliputi:

- 1) Pembangunan serta pemeliharaan jalan, infrastruktur desa
- 2) Pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur, fasilitas jalan pertanian.
- 3) Pembangunan serta pemeliharaan sarana prasarana bendungan desa
- 4) Penelitian dan pengembangan sumber energi masyarakat inovatif dan terbarukan
- 5) Pengembangan dan pelestarian lingkungan
- 6) Penciptaan dan penyelenggaraan air bersih secara besar-besaran
- 7) Konstruksi dan perawatan sistem irigasi tersier

Dana desa terutama diutamakan pada peningkatan kemampuan lokal, dengan tujuan menumbuhkan keterampilan kewirausahaan penduduk pedesaan, meningkatkan tingkat pendapatan, dan memperluas dimensi ekonomi masyarakat. Dana desa, dalam konteks ini, mewakili sumber daya keuangan komunal yang berasal dari anggaran nasional, yang kemudian dialokasikan ke desa untuk membiayai berbagai inisiatif yang ditujukan untuk pengembangan dan pemberdayaan penduduk setempat.

Sesuai dengan definisi ini, optimasi dapat dicirikan sebagai upaya terpadu, metodologi, tindakan, atau proses sosial di mana sumber daya masyarakat digunakan untuk mencapai kondisi yang paling menguntungkan, layak secara komersial, dan disukai dalam batas dan kriteria yang ditetapkan. Dalam skenario ini, optimalisasi dana desa merupakan upaya kolektif yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk mengelola anggaran dengan cara yang paling efektif, sehingga memfasilitasi pendanaan kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan masyarakat.

Adapun indikator-indikator optimalisasi menurut (R. R. Sari *et al.*, 2019) sebagai berikut:

a. Efektivitas

Kurniawan mengartikulasikan efektivitas sebagai kemampuan untuk melaksanakan tugas dan fungsi (seperti kegiatan program operasional atau misi) dalam suatu organisasi atau konteks sosial analog, tanpa mengalami kendala atau keterlambatan dalam implementasi. Dalam kerangka ini, efektivitas ditafsirkan sebagai fase mencapai keberhasilan dalam memenuhi tujuan masyarakat yang telah ditetapkan.

b. Efisiensi.

Efisiensi dimanifestasikan melalui hubungan antara hasil (*output*) dan *input*, sering mempengaruhi metrik kinerja suatu organisasi. Ini digambarkan sebagai upaya untuk mewujudkan hasil sosial yang substantif dalam jangka waktu yang ringkas dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya masyarakat yang tersedia sambil mencapai keseimbangan antara komponen tujuan, metodologi, upaya, dan sumber daya temporal.

c. Produktivitas.

Produktivitas dapat digambarkan sebagai pendekatan interdisipliner untuk menetapkan tujuan, merencanakan implementasi metodologi produktif, dan memastikan pemanfaatan sumber daya masyarakat yang efektif sambil mempertahankan standar kualitas masyarakat yang tinggi. Konsep produktivitas *holistik* atau *universal* meliputi penyebaran sumber daya manusia, kemajuan

teknologi, kemampuan administrasi, manajemen data, tenaga kerja, dan sumber daya lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan dan meningkatkan kualitas hidup. Mengenai indikator pengelolaan dana desa seperti yang dikemukakan oleh Harjono dkk. 2014 (dalam Fajar Panuluh, 2020):

1. Manajemen sumber daya dan administrasi dana desa harus dilakukan secara komprehensif dan tidak diarahkan kepada individu atau faksi tertentu. Efisiensi dan efektivitas didukung oleh usaha operasional.
2. Semua kegiatan masyarakat yang ditunjuk harus berhasil mencapai tujuan masyarakat dimaksudkan dan dapat disederhanakan, dengan pengelolaan dana desa dilakukan secara efektif dan efisien.

2.1.3. Ketahanan Pangan

Makanan mencakup semua jenis berasal dari biologis, termasuk *output* pertanian, lahan budidaya, sumber daya kehutanan, sistem perairan, ternak, badan air, dan barang olahan dan yang belum diproses yang dimaksudkan untuk konsumsi atau hidrasi manusia. Selain itu, ini terdiri dari aditif makanan, bahan makanan mentah, dan zat tambahan yang digunakan dalam prosedur persiapan makanan, pemrosesan, dan/atau produksi bahan habis pakai. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan rumah tangga secara memadai, baik dari segi kuantitas, kualitas, keamanan, pemerataan, maupun keterjangkauannya (Saputro & Fidayani, 2020).

Konsep ketahanan pangan menggambarkan kondisi di mana kebutuhan makanan rumah tangga terpenuhi secara memadai, sebagaimana dibuktikan dengan ketersediaan yang memuaskan baik dalam kuantitas dan kualitas, keamanan, kesetaraan, dan aksesibilitas. Langkah-langkah yang diusulkan untuk memfasilitasi kemajuan pembangunan ketahanan pangan yang efektif, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat.
2. Membina pengembangan sistem dan perusahaan agribisnis.
3. Menumbuhkan kolaborasi antar masyarakat sebagai peserta aktif dan pemerintah sebagai fasilitator.
4. Mempromosikan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga dengan mengatur produksi pangan secara efisien untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sementara juga memungkinkan penjualan produk pertanian *surplus* dengan harga yang adil.
5. Memperkuat kerja sama dan keselarasan di antara semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam perencanaan, perumusan kebijakan, pengembangan, dan pengawasan.

Menurut (Devi *et al.*, 2020), makanan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori berbeda berdasarkan cara pengakuannya, khususnya:

1. Pangan segar

Makanan segar merupakan komponen makanan yang belum diproses yang dapat dikonsumsi secara langsung atau digunakan sebagai elemen dasar untuk persiapan kuliner lebih lanjut, yang dapat dicerna segera atau

digunakan sebagai bahan utama dalam pengolahan makanan. Contoh ilustratif meliputi beras, gandum, berbagai varietas buah, ikan, air minum, dan lain-lain.

2. Pangan olahan

Makanan olahan berkaitan dengan makanan atau minuman yang dihasilkan melalui metodologi atau teknik tertentu, dengan atau tanpa penggabungan bahan tambahan. Contoh penting termasuk nasi, pisang goreng, teh manis, dan lain-lain.

3. Pangan Olahan Tertentu

Makanan olahan tertentu adalah bahan habis pakai yang diformulasikan untuk kelompok demografis tertentu dengan tujuan mempertahankan dan meningkatkan standar kesehatan.

Menurut (Arif *et al.*, 2020), pelaksanaan program Ketahanan Pangan memerlukan pendekatan strategis untuk implementasi kebijakan menyeluruh untuk memastikan bahwa program selaras dengan tujuan yang dimaksudkan, yang meliputi:

1. Membangun ekonomi yang berpusat pada sektor pertanian dan daerah pedesaan untuk menghasilkan peluang kerja dan sumber pendapatan.
2. Menjamin kebutuhan gizi individu yang secara ekonomi kurang beruntung dan rentan terhadap kelangkaan pangan melalui bantuan langsung untuk mencegah penurunan lebih lanjut, serta memperkuat kapasitas mereka untuk mencapai ketahanan pangan *independen*.

Pada dasarnya, gagasan ketahanan pangan mencakup beberapa dimensi, khususnya: ketersediaan pangan, stabilitas harga, dan aksesibilitas pangan. Kerangka konseptual ini harus menggabungkan setidaknya lima elemen utama, yaitu, berfokus pada kebutuhan individu dan rumah tangga, memastikan bahwa semua kategori makanan tersedia dan dapat diakses, menyediakan aksesibilitas yang memadai baik secara fisik maupun sosial ekonomi, yang bertujuan untuk memenuhi persyaratan nutrisi aman yang dapat meningkatkan kesehatan masyarakat, dan membina gaya hidup sehat dan produktif (Arif *et al.*, 2020).

Kesimpulannya, konsep ketahanan pangan yang menyeluruh umumnya memenuhi lima kriteria utama, khususnya ketersediaan pangan, akses pangan, penyerapan makanan, stabilitas pangan, dan status gizi. Ketersediaan makanan menandakan suatu kondisi di mana jumlah yang cukup, aman, dan bergizi hadir untuk semua penduduk suatu negara, terlepas dari apakah itu bersumber dari produksi dalam negeri, impor, cadangan makanan, atau bantuan kemanusiaan, dan juga harus mampu memenuhi kebutuhan kalori yang diperlukan untuk gaya hidup aktif dan sehat.

2.1.4. Program Kelompok Tani

Sebagai makhluk sosial yang dicirikan oleh interaksi sosial, setiap individu dalam konteks sosial tunggal memberikan pengaruh pada orang lain melalui keterlibatan dan perilaku interpersonal. Menurut (Raintung *et al.*, 2021) Kelompok tani adalah kumpulan individu yang terdiri dari petani dewasa dan petani muda yang tergabung secara informal dalam satu wilayah. Pembentukan kelompok ini didasarkan pada keselarasan dan kebutuhan bersama, dengan berada

di bawah pengaruh serta bimbingan seorang kontak tani sebagai pemimpin. Kelompok tani merupakan kumpulan petani, peternak, atau petani masyarakat yang dibentuk berdasarkan kepentingan bersama, kondisi lingkungan yang serupa (sosial, ekonomi, dan terkait sumber daya), dan keakraban komunal, yang bertujuan untuk meningkatkan dan memajukan usaha anggotanya, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pertanian nomor: 273/KPTS/OT.160/4/2007.

Selain itu, kolektif agraria dapat digambarkan sebagai entitas atau komunitas pedesaan tidak resmi yang muncul dari, dibentuk oleh, dan mengadvokasi kepentingan petani (Peraturan Menteri Pertanian & 82/Permentan/OT.140/8/2013, 2013). Tani berusaha untuk meningkatkan upaya kolaborasi antara petani dan nelayan dalam kelompok pertanian komunal, serta antara kolektif agraria dan organisasi lainnya. Bentuk kerja sama ini diantisipasi untuk menghasilkan kemandirian yang lebih besar dan kapasitas untuk menghadapi tantangan, gangguan, atau ancaman dalam praktik pertanian.

Komposisi anggota dalam kolektif pertanian biasanya berfluktuasi antara 20 hingga 25 individu per kelompok masyarakat, yang umumnya menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan tertentu dan perusahaan pertanian yang dilibatkannya, sesuai dengan konsensus yang dicapai oleh anggotanya. Kegiatan operasional kelompok agraria sebagian besar didasarkan pada sifat bisnis dan subsistem yang melekat pada agribisnis, meliputi penyediaan input produksi, proses produksi aktual, penanganan pasca panen, dan modalitas pemasaran.

Mengenai fungsi operasional kelompok agraria, sebagaimana digambarkan oleh (Affrian, 2022), aspek-aspek berikut diartikulasikan.

- a. Kelompok tani berperan sebagai unit pengelolaan usaha pertanian.
- b. Kelompok tani berperan sebagai unit pengolahan hasil pertanian.
- c. Kelompok tani berperan sebagai unit penyediaan sarana dan prasarana produksi.
- d. Kelompok tani berperan sebagai unit pemasaran hasil pertanian. Kolektif petani berfungsi sebagai platform penting bagi komunitas agraria untuk memperoleh kompetensi baru dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perspektif mereka. Tata kelola kolektif petani berfungsi sebagai gudang entitas pendidikan, kolaborasi, dan produksi, dipandu oleh pendekatan manajemen dan kepemimpinan masyarakat yang mencakup perencanaan, organisasi, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan.

Pemberdayaan merupakan upaya sistematis (program, proses) yang bertujuan untuk meningkatkan keberlanjutan sistem sosial untuk memfasilitasi pencapaian tujuannya secara mandiri. Kekuatan didefinisikan sebagai kapasitas yang berasal dari interaksi dan integrasi budaya manusia dan norma-norma sosial untuk berfungsi baik secara efektif maupun efisien. Pembangunan pertanian secara intrinsik terkait dengan peran penting komunitas petani, yang berfungsi sebagai pendorong fundamental ekonomi nasional. Mengingat fungsi penting ini, sangat penting untuk melakukan analisis menyeluruh terhadap komunitas petani untuk membekali petani dengan kekuatan yang diperlukan untuk mengatasi tantangan yang mereka hadapi. Inisiatif utama yang dilakukan oleh pemerintah

bekerja sama dengan petani untuk menumbuhkan otonomi petani adalah pembentukan kolektif pertanian di daerah pedesaan.

Proliferasi dan evolusi kolektif dalam konteks sosial sebagian besar bergantung pada kehadiran kepentingan dan tujuan bersama, sedangkan kohesi kolektif semacam itu, dipengaruhi oleh unsur-unsur pemersatu komunitas, dapat menumbuhkan rasa keakraban di antara individu-individu yang membentuk kelompok. Dalam hal dinamika organisasi, komunitas otonom produsen pertanian merupakan kolektif petani yang mampu membuat keputusan yang selaras dengan keadaan dan kebutuhan yang berkembang dari praktisi pertanian dan rekan-rekan mereka. Kapasitas pengambilan keputusan di berbagai aspek operasional harus didukung oleh kemahiran anggota dalam kolektif pertanian mengenai administrasi komponen organisasi yang melekat pada masyarakat. Kemajuan otonomi dalam kelompok pertanian menyatakan bahwa petani secara intrinsik terkait dengan kolektif, di mana personel penyuluhan pertanian hanya bertindak sebagai mitra, sahabat, dan fasilitator, berusaha untuk mempromosikan otonomi kolektif pertanian melalui strategi pemberdayaan khusus yang disesuaikan dengan kelompok tersebut:

- a. Peningkatan sumber daya yang dialokasikan untuk kolektif agraria pada dasarnya berakar pada partisipasi aktif petani individu, yang berfungsi sebagai anggota penting dan kekuatan pendorong di balik kemajuan kelompok pertanian, memanfaatkan sumber daya yang disediakan oleh lembaga atau asosiasi masing-masing.

- b. Proses pembangunan masyarakat dan organisasi sosial berfungsi untuk secara langsung menambah pemberdayaan petani.
- c. Mengembangkan teknologi tepat guna bagi pemberdayaan kelompok tani.
- d. Menciptakan iklim masyarakat kondusif yang memungkinkan berkembangnya keberdayaan dan kemandirian kelompok tani.
- e. Menetapkan kerangka kerja kolaborasi yang sistematis di antara kolektif pertanian, serta antara kolektif ini dan entitas politik lainnya.

Prinsip fundamental yang mendasari pemberdayaan kolektif agraria berkaitan dengan transfer otoritas dan kemampuan pengambilan keputusan ke strata bawahan masyarakat, menggunakan paradigma mengartikulasikan visi prospektif yang melibatkan semua konstituen dalam suatu inisiatif, sehingga menumbuhkan di dalamnya rasa harga diri, martabat, dan akuntabilitas yang dibudidayakan. Pemberdayaan kolektif agraria juga dapat ditafsirkan sebagai pendekatan sistematis untuk menyusun strategi yang bertujuan untuk menambah spektrum utilitas masyarakat yang telah mencapai pemberdayaan. Pemberdayaan akan menghasilkan efektivitas optimal ketika:

- a. Layak untuk membangun kerangka kerja sosial yang mendukung dalam konteks kelompok masyarakat yang dicirikan oleh elemen-elemen berikut:
 - 1. Dasar saling percaya di antara para peserta,
 - 2. Bantuan kolaboratif antar anggota,
 - 3. Dukungan timbal balik antara anggota dan mentor mereka untuk mengurangi risiko ketidakcukupan pembinaan.

4. Keberadaan dan keberhasilan masyarakat secara signifikan dipengaruhi oleh keterlibatan proaktif konstituennya.
5. Dalam konteks ini, fasilitator komunitas berfungsi terutama sebagai pendukung, memberikan dukungan penting menuju pencapaian tujuan kolektif yang dicita-citakan oleh kelompok.
6. Pemberdayaan diri masyarakat didasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang ditetapkan oleh dan untuk kepentingan petani; oleh karena itu, sangat penting bahwa kelompok merumuskan peraturan masyarakat yang terdokumentasi untuk berfungsi sebagai kerangka panduan dalam mengejar aspirasi dan cita-cita bersama.

Dalam arti luas, pemberdayaan dikonseptualisasikan sebagai upaya kolektif masyarakat yang dilakukan oleh petani atau kelompok petani untuk meningkatkan kapasitas mereka untuk penguasaan dan pemanfaatan sumber daya, baik secara internal maupun eksternal, dalam mengejar tujuan mereka; kelompok petani yang terdiri dari komunitas yang diberdayakan menunjukkan atribut khas berikut:

- 1) Memiliki kapasitas untuk menerapkan perubahan transformatif dalam lintasan masyarakat dengan kemandirian yang belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga mengatasi masalah sosial yang lazim dalam domain tersebut.
- 2) Menunjukkan kemahiran untuk secara mandiri menentukan keputusan kolektif yang optimal untuk konstituennya, memastikan realisasi hasil yang adil bagi konstituennya.

- 3) Menunjukkan kemampuan untuk mengekstraksi dan menggunakan sumber daya secara berkelanjutan, sehingga memfasilitasi transformasi komunal yang unggul dibandingkan dengan komunitas yang berdekatan.

Sejalan dengan arahan yang dikeluarkan oleh Menteri Pertanian, yang diidentifikasi sebagai nomor: 73/kpts/OT.160/4/2007, dasar hukum pembentukan kolektif agraria digambarkan sebagai berikut:

1. Permentan No.82/ Permentan/OT.140/8/2013, Tentang pedoman pembentukan kelompok tani dan gabungan kelompok tani.
2. Permentan Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pelatihan Kelembagaan Produsen Pertanian.

Sehubungan dengan kerangka prosedural untuk pembentukan kolektif petani:

1. Sebuah kolektif petani (terdiri dari minimal 20 individu) berkumpul untuk membentuk organisasi dengan niat dan tujuan komunal bersama. Kolektif ini terlibat dalam koordinasi dengan program penyuluhan pertanian (PPL) dari kantor penyuluhan pertanian Distrik dalam yurisdiksi mereka.
2. Semua konstituen kolektif berpartisipasi dalam pertemuan dengan PPL regional untuk membahas masalah pertanian kelembagaan.
3. Kolektif memilih kepemimpinannya dan menggambarkan struktur organisasi kelompok petani.
4. Majelis mengumpulkan data yang berkaitan dengan kolektif pertanian dan informasi bisnis anggotanya.

5. Pembentukan sekretariat untuk kolektif petani dilakukan.
6. Pengumuman mengenai pembentukan kelompok tani secara resmi dilaksanakan, dengan tanda tangan ketua kelompok, dan dikomunikasikan kepada PPL dan kepala desa setempat.
7. PPL akan memasukkan informasi yang berkaitan dengan kolektif petani ke dalam database Kementerian Pertanian, khususnya sistem informasi manajemen penyuluhan pertanian (Simluhtan). Pembentukan kelompok-kelompok tersebut harus dilakukan dengan tepat dan tepat; metodologi ini dirancang untuk meningkatkan pemanfaatan layanan masyarakat yang dapat diakses oleh masyarakat. Akibatnya, dukungan dapat diberikan dengan cara yang ditargetkan dan sesuai.

2.2. Penelitian terdahulu

Penelitian sebelumnya yang digambarkan dalam studi akademis berfungsi sebagai mekanisme untuk menyandingkan upaya penelitian yang sedang berlangsung dengan karya ilmiah yang sudah ada. Penelitian sebelumnya dapat berfungsi sebagai referensi penting atau panduan komprehensif dalam pelaksanaan kegiatan penelitian secara keseluruhan. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian saat ini:

Tabel 2. 1
Penelitian terdahulu yang relevan

No	Nama & Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	(Putu et al., 2021)	Optimalisasi Peran Perempuan Dan Kaum Muda	Peran Perempuan, Peran Kaum Muda, Dana Desa, Pengentasan Kemiskinan	Metode Deskriptif Kualitatif, Observasi, Wawancara	Optimalisasi Peran: Perempuan dan kaum muda di

No	Nama & Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
		Berbasis Dana Desa Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Desa Panji Kabupaten Buleleng			Desa Panji berperan aktif dalam pengentasan kemiskinan melalui program pemberdayaan yang didanai oleh dana desa
2	(Triple et al., 2024)	Kegiatan Ketahanan Pangan Hewani Dan Nabati Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat	Ketahanan Pangan Hewani Dan Nabati, Faktor Pendukung, Faktor Penghambat,	Pendekatan Kualitatif, Wawancara, Dokumentasi dan Observasi	Implementasi Program: Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Implementasi Program Ketahanan Pangan Hewani Dan Nabati Di Desa Cileles Belum Optimal.
3	(Eliyatiningsih, E., Erdiansyah, I., Syarif, M., Pratiwi, B. Y., Utami, C. D., & Hanifiyah, 2024)	Optimalisasi Kegiatan Usaha Tani Padi Untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan Keluarga	Ketahanan Pangan Keluarga, Kelompok Wanita Tani (KWT), Kendala Usaha Tani	Metode Partisipatif, Pelatihan Dan Pendampingan, Evaluasi Keterampilan	Peningkatan Keterampilan: Kegiatan pelatihan berhasil meningkatkan keterampilan anggota KWT dalam membuat pupuk hayati dan melakukan kegiatan pascapanen.
4	(Khoiriyah	Optimalisasi	Optimalisasi	Deskriptif	Diperlukan

No	Nama & Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
	et al., 2022)	Kapasitas Sdm Kelompok Tani Kampung Kukuk Sumpung Guna Meningkatkan Ketahanan Pangan	Sumber Daya Manusia, Ketahanan Pangan Di Kampung Kukuk Sumpung, Pelatihan	Kualitatif Dengan Paradigma Konstruktivisme	pendidikan, pelatihan, dan pengalaman untuk meningkatkan produktivitas kelompok tani
5	(Pangan, 2024)	Strategi Penguatan Modal Sosial Kwt Ngudi Rejeki Dalam Implementasi Kebijakan Sdgs Desa Dan Ketahanan Pangan	Modal Sosial, Ketahanan Pangan, Kinerja KWT Ngudi Rejeki	Deskriptif Kualitatif	KWT Ngudi Rejeki berada dalam kuadran III analisis SWOT, yang menunjukkan bahwa meskipun terdapat peluang besar untuk berkembang, masih ada kelemahan internal yang perlu ditangani
6	(Ginting et al., 2023)	Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Sinergi Program Puap Dengan Desa	Pemberdayaan Masyarakat Desa Program PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan) Program Demapan (Desa Mandiri Pangan)	Metode Analisis Kualitatif: Wawancara Dengan Para Pemangku Kepentingan (Pemerintah, Petani, Dan Kelompok Masyarakat)	Program PUAP dan Demapan menunjukkan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan rumah tangga tani

No	Nama & Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
		M(Mitri Nelsi1, Irfan Rizka Akbar2, 2024)andiri Pangan			dan mengurangi kemiskinan di desa-desa yang terlibat
7	(Mitri Nelsi1, Irfan Rizka Akbar2, 2024)	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Guna Mencapai Desa Mandiri Sejahtera Di Desa Rancasumur, Kecamatan Kopu, Kabupaten Serang-Banten	Pemberdayaan MasyarakatKetahanan Pangan	Metode Kualitatif Wawancara Dengan Masyarakat Untuk Mengumpulkan Data Tentang Pengetahuan Dan Keterampilan Yang Dimiliki.	pemberdayaan an masyarakat melalui penyuluhan dan pembinaan dapat meningkatkan ketahanan pangan di Desa Rancasumur. Melalui penguatan keterampilan dan pengetahuan , masyarakat dapat lebih mandiri dalam mengelola sumber daya pangan mereka
8	(Triyanti et al., 2021)	Assessment of the success factors influencing of rice-fish farming innovation village to support food	Terikat: Sistem pertanian Bebas: ketahanan pangan	Metode Pengumpulan Data: Survei dengan kuesioner terstruktur Wawancara mendalam dengan informan	Inovasi desa mina-padi dapat mendukung ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi lokal.

No	Nama & Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
		security		kunci Diskusi kelompok terfokus (focus group discussions)	
9	(Njonge, 2023)	Development Of An Optimization Model For The Utilization Of Village Fund In Puri Mojokerto District	Variabel Terikat: Pemanfaatan Dana Desa Variabel Bebas: Model optimasi pemanfaatan Dana Desa. Peran pemerintah desa	Pendekatan: Kualitatif deskriptif Sumber Data: Data primer dan sekunder	Model optimasi pemanfaatan Dana Desa diharapkan dapat memberikan solusi dalam mengeksplorasi potensi sumber daya desa dan pengembangan ekonomi masyarakat
10	(Indraningsih et al., 2021)	The Impact of the Use of Village Funds on Sustainable Agricultural Development	Variabel Bebas: Penggunaan Dana Desa Infrastruktur yang dibangun menggunakan Dana Desa Program pelatihan dan pemberdayaan masyarakat Variabel Terikat: Pembangunan pertanian berkelanjutan Produksi dan pendapatan petani Kesejahteraan masyarakat desa	Metode deskriptif eksploratif	Dana Desa berpengaruh positif terhadap peningkatan produksi dan pendapatan petani.

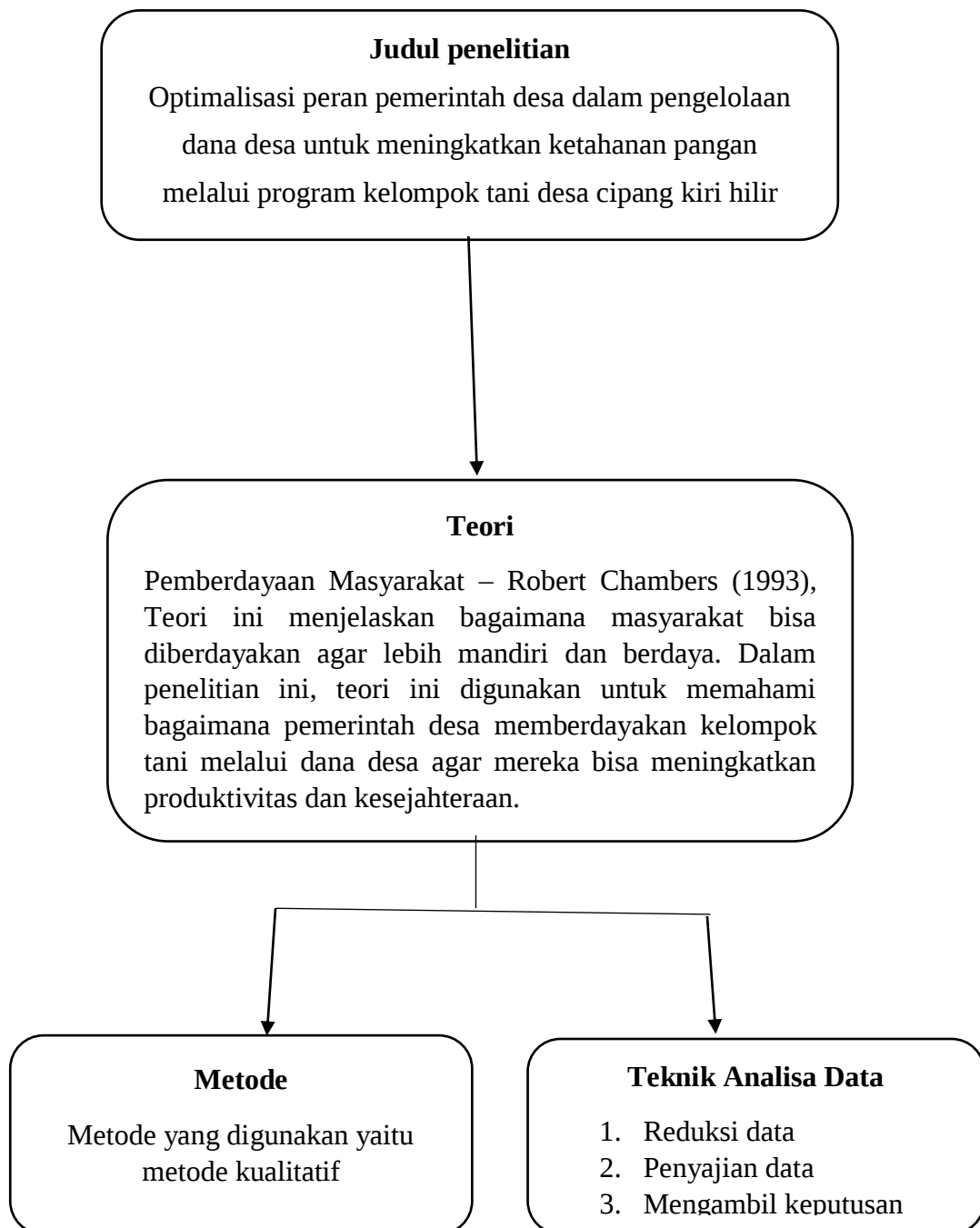
Sumber: Olah data 2025

2.3. Kerangka pikir

Penelitian ini didasari oleh pentingnya peran pemerintah Desa dalam mengelola dana Desa untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat. Dalam hal ini, teori pemberdayaan masyarakat dari Julian Rappaport (2020) digunakan untuk memahami bagaimana pemerintah Desa memberdayakan kelompok tani agar lebih mandiri dan berdaya.

Pemerintah Desa berperan sebagai fasilitator dalam menyalurkan dana Desa untuk program pertanian yang mendukung ketahanan pangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis berupa reduksi data dan penyajian data, guna menggali peran pemerintah dalam proses pemberdayaan tersebut.

Gambar 2. 1 kerangka pikir



Sumber : (Putu et al., 2021)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan penelitian

Metodologi yang digunakan untuk penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan komponen penelitian deskriptif, yang sering digunakan untuk tujuan analisis. Informasi yang dikumpulkan dalam penelitian ini menjadi sasaran pemeriksaan kualitatif (sebagai lawan dari analisis kuantitatif) data tersebut dapat bermanifestasi dalam berbagai bentuk, termasuk wawancara yang ditranskripsi, catatan lapangan, dokumen, atau materi visual seperti foto, video, dan konten digital yang berkaitan dengan kehidupan individu atau kelompok.

Mengingat bahwa esensi penelitian kualitatif adalah holistik (komprehensif dan saling bergantung), peneliti kualitatif akan mendasarkan penyelidikan mereka tidak hanya pada variabel yang berkaitan dengan penelitian, tetapi juga pada konteks sosial yang lebih luas dari masyarakat yang diperiksa secara keseluruhan. Ini mencakup lokasi komunitas, pesertanya, serta interaksi sinergis di antara kegiatan masyarakat.

3.2. Waktu dan tempat penelitian

Lokasi yang ditunjuk untuk penelitian ini adalah desa Cipang Kiri Hilir, yang terletak di Kecamatan Rokan Iv Koto, Kabupaten Rokan Hulu. Pemilihan tempat penelitian dilakukan dengan sangat hati-hati. Mengingat bahwa sebagian besar populasi di wilayah ini terdiri dari petani, dan ada 3 kelompok tani dalam sebuah desa. Terbagi menjadi 3 dusun yang menerima bantuan ternak sapi, maka

lokasi ini dianggap sesuai untuk penelitian. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan pada bulan September 2024 hingga Januari 2025.

Tabel 3. 1
Time Table Penelitian

Detail Kegiatan	September	Oktober	November	Desember	Januari
Pra Research					
BAB 1					
BAB 2					
BAB 3					

Sumber: Olah data 2024

3.3. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi tentang objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.

Tabel 3. 2
Informan Penelitian

Jabatan	Jumlah	Jenis Wawancara
Kepala Desa Cipang Kiri Hilir	1 Informan	Semi-Terstruktur
Kaur Keuangan Desa Cipang Kiri Hilir	1 Informan	Semi-Terstruktur
Ketua Dan Anggota Kelompok Tani Harapan Kita Dusun 1 Tandikat, Cipang Kiri Hilir	2 Informan	Semi-Terstruktur
Ketua Dan Anggota Kelompok Tani Harapan Kita Dusun 2 Lubuk Ingu, Desa Cipang Kiri Hilir	2 Informan	Semi-Terstruktur
Ketua Dan Anggota Kelompok Tani Harapan Kita Dusun 3 Simpang, Desa Cipang Kiri Hilir	2 Informan	Semi-Terstruktur
Jumlah	8 Informan	

Sumber: Olah data 2024

Penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam dengan cara semi-terstuktur terhadap informan yang memiliki relevansi dengan permasalahan dalam penelitian ini. Semi-terstruktur yaitu jenis wawancara beberapa pertanyaan telah

ditentukan sebelumnya, tetapi pertanyaan lainnya tidak direncanakan dan pertanyaan yang diajukan bersifat terbuka namun ada batasan tema dan akur pembicaraan.

3.4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Sumber data *primer*

Pengumpulan utama informasi melalui metodologi wawancara, pengamatan, dan catatan lapangan, serta pemanfaatan dokumen, dicirikan sebagai data primer. Informasi yang diperoleh langsung dari informan atau sumber langsung lainnya ditetapkan sebagai sumber data utama. Sumber utama data adalah bahwa komunitas menyediakan data langsung ke pengumpul data (D. Sugiyono, 2024). Kepala desa, pimpinan desa, tokoh masyarakat, dan dua puluh kepala kelompok tani dari empat puluh kelompok masyarakat merupakan sumber utama data masyarakat yang digunakan dalam penelitian ini.

2. Sumber Data *Sekunder*

Pemeriksaan perpustakaan, dokumentasi, buku, majalah, dan arsip tekstual yang relevan dengan topik dalam penelitian ini. Sumber *sekunder* adalah sumber masyarakat memasok data kepada peneliti dalam memperoleh data dengan tidak langsung, seperti melalui orang ataupun dokumen lain (D. Sugiyono, 2024). Sumber data sekunder dapat membantu peneliti dalam menggabungkan data dan menilai hasil penelitian, sehingga menghasilkan temuan yang lebih kokoh dan penelitian dengan tingkat validitas tinggi.

3.5. Teknik mengumpulkan data

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data; akibatnya, metodologi untuk akuisisi data merupakan fase kritis dari penyelidikan. Berbagai metodologi untuk pengumpulan data komunitas digunakan sebagai berikut:

1. Observasi

Data atau bukti empiris dikumpulkan melalui metodologi observasional yang sangat menarik bagi para peneliti dalam domain ilmiah. Pengamatan langsung (keterlibatan) dan observasi tidak terstruktur mewakili dua modalitas penyelidikan observasional yang berbeda. Ada dua kategori strategi pengamatan: observasi terbuka dan pengamatan tertutup. Secara dominan, studi observasional dilakukan untuk mendapatkan wawasan mengenai perilaku informan dan anggota masyarakat lainnya yang dianggap sesuai. Tujuan pengamatan adalah untuk menjelaskan aspek-aspek tertentu dari masyarakat yang sedang diperiksa dalam penelitian ini, serta untuk mendokumentasikan praktik sosial yang bertahan lama, yang mencakup individu-individu dalam komunitas yang diteliti.

Menurut Harahap, 2020 Untuk keperluan observasi tersebut dapat dilakukan berbagai kegiatan, diantaranya:

- a. Buatlah daftar pertanyaan berdasarkan informasi masyarakat perlu dikumpulkan.
- b. Tentukan target pengamatan dan waktu masyarakat diperlukan untuk mengamati target tersebut.

- c. Melihat target secara keseluruhan, termasuk maksud dan tujuan utama, serta hubungan antar target.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metodologi yang sangat efektif untuk pengumpulan data, terutama ketika peneliti berusaha melakukan penyelidikan eksplorasi yang bertujuan mengidentifikasi subjek penyelidikan, atau ketika tujuannya adalah untuk memperoleh wawasan yang lebih bernuansa dari responden, terutama ketika ukuran sampel dibatasi. Cara pengumpulan data khusus ini bergantung pada informasi yang dilaporkan sendiri, terlepas dari apakah itu berasal dari pengalaman pribadi atau keyakinan (D. Sugiyono, 2024); wawancara ini biasanya dilakukan secara sistematis dan dapat dilakukan baik tatap muka atau melalui telekomunikasi. Dalam bidang penelitian akademis, para sarjana sering menggunakan teknik wawancara; Namun, penting untuk mengakui bahwa wawancara tidak menghalangi munculnya topik tambahan yang mungkin muncul secara spontan selama dialog

3. Dokumen

Sebuah dokumen berfungsi sebagai bukti arsip untuk fenomena sosial yang terjadi secara historis. Dokumen-dokumen tersebut dapat bermanifestasi dalam berbagai format, termasuk karya sastra, bukti fotografi, atau upaya signifikan individu. Pemeriksaan materi tambahan dalam penelitian kualitatif, menggunakan metodologi observasional dan wawancara (D. Sugiyono, 2024).

4. Kepustakaan

Kepustakaan mengacu pada data atau informasi yang diperoleh dari publikasi ilmiah, artikel berita diinternet, skripsi, tesis serta sumber lain dalam mengembangkan sebuah teori atau gagasan berkaitan dengan topik penelitian. Upaya ini dilakukan untuk mengidentifikasi sumber data sekunder yang akan memfasilitasi penelitian melalui pemanfaatan sumber daya dokumenter.

3.6. Pemeriksaan Keabsahan Data

Keaslian data diteliti dalam penelitian kualitatif untuk memastikan ketidakberpihakan temuan. Penilaian kredibilitas merupakan pemeriksaan validitas data yang digunakan dalam penelitian, di mana penilaian ini dapat memastikan keaslian data dalam penelitian (validitas internal). Validitas berkaitan dengan tingkat keselarasan antara informasi yang dikumpulkan di lapangan dan informasi yang disebarluaskan oleh peneliti. Akibatnya, data yang valid menandakan korespondensi antara apa yang disampaikan peneliti dan apa yang diungkapkan subjek penelitian. Validitas internal berkaitan dengan tingkat koherensi antara metodologi penelitian yang digunakan dan hasil yang dihasilkan.

Pengumpulan data mencakup banyak metodologi pengumpulan informasi, menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data, dan agregat data biasanya disebut sebagai triangulasi. Dalam penelitian ini, triangulasi ditafsirkan ulang sebagai validasi data yang diperoleh dari beragam sumber pada berbagai interval temporal. Triangulasi digunakan tidak hanya untuk memastikan kebenaran mengenai terjadinya suatu fenomena tetapi juga untuk meningkatkan pemahaman temuan (D. Sugiyono, 2024).

Triangulasi data yang digunakan dapat berupa:

1. Triangulasi sumber, artinya peneliti melakukan perbandingan dengan mengecek kembali informasi masyarakat diperoleh dengan berbagai waktu dan teknologi berbeda, berarti kebenaran data yang dikumpulkan sebelum memperoleh informasi sesuai. Para sarjana terlibat dalam wawancara kualitatif dengan perwakilan pemerintah, kepala desa, influencer komunitas, dan pemimpin organisasi pertanian untuk memperoleh kumpulan data yang beragam dan hasil yang kredibel. Triangulasi sumber merupakan kerangka metodologis untuk memvalidasi data melalui penjajaran informasi yang diperoleh dari berbagai asal. Data telah dikumpulkan dari berbagai sumber dan kemudian diartikulasikan dan diklasifikasikan melalui perspektif yang seragam, bervariasi, dan berbeda untuk memfasilitasi derivasi kesimpulan dan konsensus di antara informan.
2. Menggunakan metodologi triangulasi, peneliti mengadopsi pendekatan komparatif untuk memastikan keandalan informasi yang diperoleh dengan menganalisis data dari sumber yang sama melalui berbagai modalitas. Penyelidik menyandingkan data observasional dengan tanggapan wawancara, mendokumentasikan temuan, dan pada akhirnya mengintegrasikan konsep terbaru yang berkaitan dengan penyelidikan penelitian. Triangulasi metodologis, juga disebut sebagai triangulasi teknis, merupakan strategi evaluasi data yang menggabungkan dan membedakan sumber data melalui beragam teknik. Jika analisis data menghasilkan hasil yang berbeda, peneliti

kembali ke sumber informasi asli untuk memastikan keakuratan data atau untuk menentukan validitas temuan meskipun sudut pandang berbeda.

3. Triangulasi waktu mengacu pada durasi yang dialokasikan untuk menilai kredibilitas data melalui pelaksanaan pengamatan dan wawancara di berbagai konteks temporal dan spasial. Dalam kasus di mana hasil penilaian mengungkapkan inkonsistensi, proses diulangi sampai data mencapai tingkat kepastian. Tujuan dari triangulasi waktu adalah untuk menentukan dan mengetahui lapangan (P. D. Sugiyono, 2017).

3.7. Teknik Analisis Data

Dalam konteks metodologi analisis data, kerangka analisis yang diusulkan oleh Miles dan Huberman akan digunakan dalam penyelidikan ini. Seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, kegiatan yang berkaitan dengan analisis data kualitatif dijalankan secara interaktif dan bertahan sampai titik saturasi tercapai dalam data. Proses pengurangan data, penyajian data, dan pengambilan dan verifikasi kesimpulan merupakan kegiatan mendasar yang terlibat dalam analisis data.

1. Data Reduction (Reduksi Data),

Pengurangan data merupakan pendekatan metodologis untuk elaborasi data yang memerlukan ringkasan dan identifikasi elemen komunitas yang paling menonjol, berkonsentrasi pada mereka, mengeksplorasi tema dan pola berulang, dan menghilangkan data asing. Akibatnya, informasi suling yang dimiliki oleh individu dapat mengartikulasikan tanggapan tegas, sehingga memfasilitasi proses bagi peneliti untuk memperoleh informasi selanjutnya.

2. Data *display* (penyajian data)

Tabel, diagram lingkaran, piktoqram, dan berbagai representasi visual data lainnya digunakan dalam metodologi penelitian kuantitatif. Sebaliknya, data dalam penelitian kualitatif disajikan melalui eksposur atau narasi ringkas, denah lantai, korelasi kelompok, diagram alur, serta serangkaian alat bantu visual lainnya. Miles dan Huberman (dalam Suyatno, *et al.*, 2021) menegaskan bahwa praktik penulisan cerita pendek secara konsisten digunakan dalam kerangka kualitatif untuk penyajian data

3. *Conclusion Drawing/ Verification*

Menurut Miles dan Huberman (dalam BELLA, 2022), fase tersier menguraikan data kualitatif memerlukan mengartikulasikan temuan sambil juga memanfaatkannya secara efektif. Kesimpulan tetap tentatif, tunduk pada modifikasi jika ada informasi publik yang tidak memadai untuk membenarkan pengumpulan data tambahan. Namun, ketika para peneliti kembali ke lapangan untuk mendapatkan informasi, kesimpulan awal, didukung oleh data publik yang andal dan konsisten, mencapai tingkat kepercayaan

3.8. Definisi Operasional Variabel

Tabel 3. 3
Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Indikator
1	Optimalisasi dana desa	• Efektifitas dan Efesiensi • Produktifitas
2	pemberdayaan masyarakat	• Jumlah penduduk miskin • Perkembangan usaha • Kesejahteraan masyarakat
3	Kelompok tani	• Kemampuan perencanaan • Kemampuan pengorganisasian • Kemampuan melaksanakan kegiatan • Kemampuan melakukan pengendalian dan pelaporan • Kemampuan mengembangkan kepemimpinan

Sumber: Olah data 2024